



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MUIZ THOHIR
2. Jabatan : KEPALA BALAI
3. NHK : 496900

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **3.747.750.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/126 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah Seluas 77 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
4. Tanah Seluas 357 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 267.750.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 54 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/200 m2 di KAB / KOTA SERANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 500.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/98 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **208.500.000**

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000



2. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.  
198.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.  
7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 402.059.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 274.763.782

F. HARTA LAINNYA Rp. 169.436.503

Sub Total Rp. 4.802.509.285

III. HUTANG Rp. 150.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.652.509.285

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.